

STUDI KOMPARATIF PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA DENGAN MALAYSIA : MEMBANDINGKAN PRINSIP, STANDAR, DAN PRAKTIK AKUNTANSI PEMERINTAHAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA UNTUK MENGIDENTIFIKASI BEST PRACTICES DAN AREA PERBAIKAN

¹Iffah Su'aidah, ²Yunisa Nurul Maulidah, ³Hani Sutyani, ⁴Sulistia Ramandani,

⁵Muhammad Yusuf, ⁶Yohanes Agung Nugroho

¹⁻⁶Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana
Informatika

63230543@bsi.ac.id¹, 63231493@bsi.ac.id², 63230966@bsi.ac.id³, 63230530@bsi.ac.id⁴,
63221053@bsi.ac.id⁵, yohanes.yag@bsi.ac.id⁶

ABSTRAK

Akuntabilitas publik merupakan pilar fundamental dalam good governance sektor publik. Indonesia dan Malaysia menghadapi tantangan serupa dalam menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan strategi dan regulasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerangka regulasi, standar akuntansi, hambatan implementasi, serta best practices di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Hasil dan pembahasan menunjukkan Indonesia menerapkan SAP yang dikembangkan secara lokal, sedangkan Malaysia menggunakan MPSAS yang menyelaraskan diri dengan IPSAS global. Indonesia menghadapi kendala implementasi pada sistem SAKTI berupa keterbatasan sertifikasi SDM, infrastruktur TI usang, dan SOP kompleks. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan transisi di tingkat negara bagian melalui sistem ISPEKS berupa fenomena reform fatigue, kurangnya tenaga ahli, dan rotasi kerja yang cepat. Simpulannya, perbaikan kedua negara memerlukan penguatan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi keahlian, dan pembaruan infrastruktur teknologi.

Kata Kunci : *Akuntansi Pemerintahan, Studi Komparatif, SAP, MPSAS, Basis Akrual, Sektor Publik*

PENDAHULUAN

Dalam hal lembaga publik, akuntabilitas kinerja sangat krusial bagi tata kelolanya yang baik. Langkah terakhir dari akuntansi sektor publik ialah akuntabilitas publik, yang menilai efisiensi badan-badan publik dalam mencapai tujuannya. Organisasi sekarang diwajibkan secara hukumnya agar menjaga tanggung jawab mereka terkait dengan kinerja yang mereka hasilkan dikarenakan akuntabilitas kinerja merupakan komponen fundamental dari peraturan organisasinya. Meningkatkan efektivitas serta efisiensi prosedur perusahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerjanya. Di antara langkah-langkah tersebut ialah persiapan, alokasi, pemantauannya, pelaksanaannya, pelaporan, audit, serta

pelaporan status keuangan kepada publiknya

Meskipun suatu aktivitas ekonominya ataupun transaksi hanya akan berdampak pada arus kas di kemudian hari, namun tetap didokumentasikan selaras dengan akuntansi akrual. Dengan mempertimbangkan prosedur, manajemen, sumber daya, serta faktor-faktor lain yang terkait dengan organisasi pemerintah, SAP melakukan kegiatan akuntansinya secara teratur dan metodis. Auditor syariah yang melaksanakan audit atas laporan keuangan di Indonesia harus mempunyai pengetahuan dan keahlian yang luas dalam bidang akuntansi keuangan serta hukum syariahnya. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengelola evaluasi kompetensi untuk auditor syariah melalui Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS). Di Malaysia, ketika

melakukan audit laporan keuangan, auditor diwajibkan menunjukkan keahlian mereka, mematuhi standar profesional dalam laporan mereka, dan mengikuti kerangka audit syariah karena tidak adanya regulasi saat ini untuk tata kelola syariah. (Peng & Isa, 2020).

Indonesia dan Malaysia, negara tetangga dalam ASEAN, menghadapi kesulitan yang serupa dalam menerapkan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Indonesia telah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual (SAP) sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 71 pada tahun 2010, sedangkan Malaysia mengadopsi Standar Akuntansi Sektor Publik Malaysia (MPSAS), yang selaras dengan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS), mulai 1 Januari 2017. Namun, meskipun kedua negara telah mengadopsi metode akrual, strategi mereka dalam penerapannya berbeda karena kondisi lokal, ketersediaan personel terampil, dan infrastruktur teknologi. (Iciah et al., 2024)

Rumusan Masalah 1. Apa perbedaan prinsip dan standar akuntansi pemerintahan antara Indonesia (SAP) dan Malaysia (MPSAS)? 2. Bagaimana tantangan implementasi praktik akuntansi pemerintahan di kedua negara? 3. Apa saja best practice yang dapat diadopsi satu sama lain dari indonesia dan malaysia?

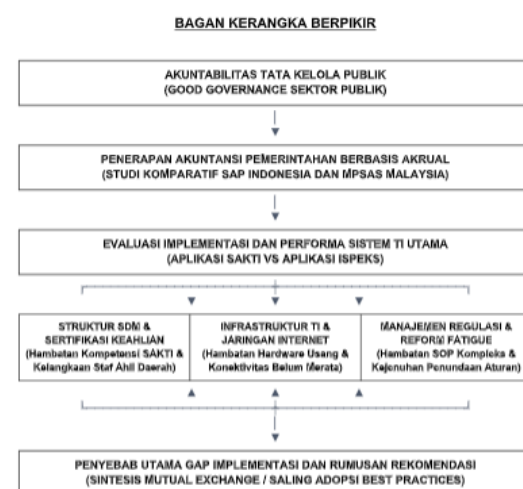
Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui perbedaan prinsip, standar, dan praktik akuntansi pemerintahan Indonesia-Malaysia. 2. Untuk mengetahui tantangan utama implementasi di kedua negara yaitu indonesia dan Malaysia. 3. Untuk mengetahui best practice yang dapat diadopsi satu sama lain dari indonesia dan malaysia.

Manfaat Penelitian 1. Memberikan pengetahuan tentang perbedaan prinsip, standar, dan praktik akuntansi pemerintahan Indonesia-Malaysia. 2. Memberikan pengetahuan tentang tantangan utama implementasi di kedua negara yaitu indonesia dan malaysia. 3. Merekomendasikan best practice yang

dapat diadopsi satu sama lain dari indonesia dan malaysia.

METODE PENELITIAN

Dengan menerapkan strategi studi literatur (library research), studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif serta komparatif. Studi ini bertujuan guna memahami serta membandingkan prinsip dan standar akuntansinya pada negara indonesia dengan malaysia untuk mengidentifikasi best practices dan area perbaikan. Penelitian ini memilih sumber literatur yang relevan, terpercaya dan berkualitas, hal ini bertujuan agar peneliti dan pembaca mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip dan standar akuntansi negara indonesia dan malaysia. Serta untuk mengetahui best practices satu sama lain negara indonesia dan malaysia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntansi pemerintahan di Indonesia menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual penuh sejak 2015, yang mengadopsi International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset negara dan pelaporan keuangan daerah. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual memiliki hubungan yang erat dengan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan efektivitas dalam

pengelolaan sektor publik. Akuntabilitas publik dipahami sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan penggunaan sumber daya publik kepada Masyarakat. (Tarigan et al., 2026) Malaysia menggunakan Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPAS) yang juga berbasis IPSAS, dengan adaptasi lokal melalui Malaysian Financial Reporting Standards (MFRS) untuk sektor publik, yang telah mencapai implementasi lebih matang berkat sistem IT terintegrasi seperti 1Government Financial Management System. Tantangan utama di Indonesia mencakup kurangnya kompetensi SDM, keterbatasan sistem informasi akuntansi, dan resistensi perubahan dari basis kas ke akrual, sementara Malaysia lebih maju dalam konsistensi pelaporan dan pengelolaan aset tetap. Studi komparatif ASEAN menunjukkan potensi adopsi best practices Malaysia oleh Indonesia, khususnya dalam pengungkapan kinerja dan harmonisasi standar regional untuk mendekati praktik global IPSAS. Prinsip Akuntansi Pemerintahan di dua negara ini berbeda-beda, tinjau bagaimana masing-masing negara mengadopsi prinsip akuntansi. Pada PP 71 tahun 2010 pasal 4 ayat 1-4 : 1. “Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. 2. SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk PSAP. 3. SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. 4. PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini”. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dalam Pasal 32 menetapkan bahwa format dan konten laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus dirancang dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar tersebut disusun oleh Komite

Standar Akuntansi Pemerintahan yang bersifat mandiri dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP dengan metode Akrual dilakukan oleh KSAP melalui prosedur standar penyusunan (due process)”. Pemerintah sudah melaksanakan hal tersebut melalui “Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III, KSAP bertanggung jawab secara profesional atas proses pengembangan SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, auditor, penyusun laporan keuangan, serta pengguna laporan keuangan bisa mengacu pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan agar memperoleh panduan mengenai hal-hal yang tidak tercakup dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan; kerangka ini juga menjadi dasar pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP”. Undang-Undang Keuangan Negara mengamanatkan bahwasanya pemerintah menetapkan standar akuntansi. Dalam hal transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, standar akuntansi pemerintah ini memakai basis kas. Namun, dalam hal aset, kewajiban, serta ekuitas dananya, standar akuntansi ini menerapkan basis akrual. (Silva, 2016). Penerapan “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara seperti yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal tersebut menyatakan bahwa selama sistem pengakuan dan pengukuran pendapatan serta belanja berdasarkan akrual belum diterapkan, harus menggunakan sistem pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Sistem pengakuan dan pengukuran yang berbasis akrual mengacu “Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 harus mulai dijalankan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun”. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu direvisi. (Silva, 2016). Penyusunan Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Pusat didasarkan pada: 1. “Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta Interpretasi dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP). 2. Berita teknis dan produk lain yang dihasilkan oleh KSAP. 3. Aturan, ketentuan, serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam aspek akuntansi dan pelaporan keuangan; 4. Peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan laporan keuangan; 5. Standar akuntansi internasional terbaru yang dirilis oleh lembaga penyusun standar akuntansi untuk sektor publik yang lain”. Semua orang, mulai dari mereka yang bertanggung jawab atas akuntansi serta pelaporan keuangan hingga mereka yang mempelajari laporan keuangannya, bergantung pada prinsip-prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan sebagai landasan untuk penetapan standar, fungsi manajemen, dan memahami informasi yang disediakan oleh laporan keuangannya. Basis akrual ialah standar dalam pelaporan keuangan pemerintahnya. Metode akuntansi akrual menetapkan bahwasanya pendapatan dicatat pada saat hak untuk menerimanya telah ditetapkan, terlepas dari apakah dana tersebut telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Negara ataupun belum. Sebaliknya, beban dicatat pada saat timbulnya kewajiban yang mengurangi ekuitas dana lancar, tanpa memperhatikan apakah dana tersebut sudah ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara atau belum. Namun demikian, dengan masih dipergunakannya teknik kas dalam penyusunan dokumen anggaran, maka LRA juga bisa disusun dengan cara yang sama. (Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, 2024).

Indonesia – SAP

SAP di Indonesia disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dengan perluasan dan perubahan melalui PP serta

peraturan pelaksana lainnya. Berbagai laporan keuangannya, termasuk laporan dana operasional, arus kasnya, neraca, serta informasi tambahan, disiapkan dan ditangani oleh SAP baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Malaysia – MPSAS

MPSAS disusun oleh Malaysian Accounting Standards Board (MASB) dan merujuk pada kerangka International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), namun diadaptasi dengan kondisi lokal. MPSAS mengatur standar pelaporan keuangan komprehensif (comprehensive basis of accounting), termasuk pelaporan aset tetap, kewajiban, dan kinerja entitas pemerintah.

Akuntansi pemerintahan di Malaysia diarahkan oleh MPSAS yang diterbitkan oleh MASB. MPSAS pada dasarnya mengadopsi dan menyesuaikan kerangka International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), sehingga prinsip dan praktiknya lebih dekat dengan standar global sektor publik, misalnya pengakuan akrual penuh, representasi wajar, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas dan negara. Praktik di Malaysia menunjukkan bahwa sistem tata kelola dan pengawasan keuangan publik cukup kuat, ditunjang oleh lembaga audit dan komisi pengawas keuangan yang aktif. Kondisi ini mendukung konsistensi dan standarisasi pelaporan keuangan di berbagai kementerian dan agensi pemerintah, meskipun tetap ada penyesuaian terhadap konteks politik dan administratif lokal. Beberapa kajian komparatif menunjukkan bahwa Malaysia lebih awal melakukan pergeseran menuju best practices akuntansi pemerintahan, sehingga praktik-praktik di sana sering dijadikan referensi dalam studi di kawasan ASEAN. Melalui MPSAS, Malaysia mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi keuangan sebagai bagian dari good governance di sektor publik. Adapun

Perbandingan prinsip dan standar akuntansi pemerintah :

Basis Akuntansi: Indonesia menggunakan akuntansi berbasis akrual, tetapi implementasi di lapangan masih bercampur dengan pola berbasis kas dan anggaran, terutama di tingkat daerah. Sementara di Malaysia, MPSAS mendorong penerapan akrual secara lebih konsisten, sehingga laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi keuangan dan posisi aset secara komprehensif

Kerangka Standar: SAP Indonesia disusun dan dikembangkan secara lokal, meskipun KSAP mengacu pada prinsip-prinsip internasional. Di sisi lain, MPSAS Malaysia secara eksplisit merujuk IPSAS, sehingga struktur dan substansi standarnya lebih selaras dengan kaidah sektor publik global.

Cakupan laporan keuangan: Di Indonesia, laporan keuangan mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan keterangan tambahan, namun penekanan utama masih kuat pada anggaran. Di Malaysia, laporan keuangan berbasis akrual dan MPSAS menekankan keterbukaan data keuangan, pengungkapan aset dan kewajiban, serta laporan kinerja yang lebih terukur.

Perbandingan kedua negara tidak hanya terletak pada regulasi formal, akan tetapi pada budaya akuntabilitas serta praktek di lapangan. Di Indonesia, beberapa penelitian kualitatif melaporkan bahwa SDM, sistem informasi, dan kapasitas kelembagaan masih menjadi faktor penghambat penerapan SAP secara konsisten, terutama di daerah-daerah yang terbatas dalam sumber daya dan pelatihan. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan kadang hanya dipahami sebagai “laporan administratif” semata, bukan sebagai alat akuntabilitas dan perencanaan. Sebaliknya, di Malaysia, pelatihan dan penyebaran pemahaman tentang MPSAS dilakukan secara terstruktur, diikuti dengan peran aktif lembaga audit dan pengawas. Budaya tata kelola yang kuat mendorong entitas pemerintah untuk memandang laporan keuangan sebagai sarana

akuntabilitas serta pengambilan keputusan, bukan sekadar kewajiban administratif. Sesuai dengan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disebutkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP menggunakan metode akrual”. Dalam pelaporan keuangannya, SAP Berbasis Akrual mencatat pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana selaras dengan metode akrualnya. Dalam pelaporan pelaksanaan anggaran, SAP Berbasis Akrual mencatat pembiayaan, penerimaan, serta pengeluarannya konsisten dengan kriteria yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah(APBN/APBD).(BPK, 2010). Standar Akuntansi Sektor Publik Malaysia atau MPSAS 17 mengatur tata cara pencatatan aset tetap seperti : properti, pabrik, dan peralatan bagi entitas pemerintah menggunakan basis akrual. Fokus utama standar ini mencakup : pengakuan aset, perhitungan nilai tercatat, hingga penyusutan dan penurunan nilainya. Aset yang dimaksud mencakup barang berwujud untuk keperluan produksi, layanan, administrasi, disewakan, termasuk aset infrastruktur dan militer yang digunakan untuk jangka panjang. Perlu dicatat bahwa MPSAS 17 tidak berlaku untuk aset biologis pertanian, hak tambang, dan cadangan sumber daya (Huzaimi et al., 2024). Adapun tantangan implementasi pada negara indonesia yaitu kendala pada SDM. adapun salah satu sistem yang digunakan dalam lembaga pemerintah indonesia yaitu SAKTI. SAKTI adalah singkatan dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Ini adalah aplikasi pengelolaan keuangan terintegrasi yang digunakan oleh seluruh satuan kerja (satker) di Kementerian Negara/Lembaga pemerintah Indonesia, yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Ada beberapa tantangan penting yang dihadapi dalam pelaksanaan SAKTI, yang meliputi: kekurangan personel terampil untuk mengawasi keuangan negara, khususnya terkait dengan sertifikasi keterampilan.

Meskipun ada tenaga kerja yang memadai, peningkatan kualitas masih diperlukan, kondisi infrastruktur yang tidak memadai, terutama dengan perangkat keras yang sudah tua dan konektivitas internet yang perlu perbaikan, proses operasional yang rumit, di mana prosedur operasi standar dan alur kerja sistem SAKTI masih sulit dipahami dan digunakan dengan sukses oleh pengguna, serta kurangnya kerja sama di antara unit kerja, yang berdampak pada efektivitas keseluruhan pelaksanaan sistem. (Soemartono & Rachmatsyah, 2025). Melakukan sertifikasi kompetensi SAKTI agar mengembangkan pengetahuan serta memastikan implementasi SAKTI berjalan dengan baik serta benar merupakan salah satu langkah untuk menjawab tantangan dalam mengimplementasikan SAKTI. Langkah lainnya ialah dengan meningkatkan infrastruktur, yang mencakup peningkatan perangkat keras serta memastikan koneksi internet yang handal, guna memastikan SAKTI berjalan lebih lancar serta efektif. Sedangkan, tantangan pada negara malaysia yaitu proses transisi penuh ke akrual di level negara bagian. semua pemerintah negara bagian telah mulai menggunakan akuntansi akrual melalui sistem akuntansi terkomputerisasi terintegrasi MPSAS yang dikembangkan oleh AGD, yaitu ISPEKS (kecuali Sabah dan Sarawak, yang mengembangkan sistem akuntansi mereka sendiri). Penundaan pelaporan wajib berdasarkan akrual dan MPSAS serta ketidakpastian tanggal implementasi yang tepat telah menyebabkan kelelahan di kalangan staf akuntansi. Staf yang telah dilatih sebelumnya perlu dilatih ulang setelah beberapa tahun. Selain itu, implementasi akuntansi akrual oleh pemerintah daerah menghadapi tantangan karena kurangnya staf akuntansi yang berkualifikasi. Lebih lanjut, praktik rotasi staf akuntansi setiap 3-5 tahun telah menambah kesulitan dalam memenuhi persyaratan keterampilan yang diperlukan di setiap pemerintah daerah. hampir serupa di

semua tingkat pemerintahan, termasuk pemerintah negara bagian. Staf akuntansi dan keuangan menghadapi masalah serupa dalam mengenali item akuntansi atau pengkodean.faktor keberhasilan yang paling penting adalah keterampilan staf, diikuti oleh kerja tim dan komitmen di antara staf di departemen akuntansi dan keuangan, dukungan dan dorongan manajemen puncak, kursus penyelenggaraan MPSAS yang sering diadakan, dan dukungan infrastruktur yang memadai (Hasan et al., 2022). Dalam menghadapi tantangan proses transisi penuh ke akrual di level negara bagian, sebaiknya pemerintah negara bagian menyelenggarakan program pelatihan yang terencana dan baik guna untuk meningkatkan keterampilan pada staff akuntansi bahkan pada semua staff pendukung untuk memastikan jumlah staff yang cukup tersedia di pemerintah negara bagian, lalu diadakannya juga program terencana dan baik untuk mengatasi kelelahan reformasi secara efektif.

KESIMPULAN

Indonesia menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sendiri, yang dibuat secara lokal oleh KSAP sesuai dengan “Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Meskipun pelaporan keuangan telah beralih ke sistem berbasis akrual penuh, tetap ada pendekatan ganda dalam praktik karena Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masih mewajibkan penggunaan basis kas sesuai dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD)”. Di sisi lain, Malaysia (MPSAS) secara langsung selaras dengan pedoman internasional yang ditetapkan oleh International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), dimodifikasi agar sesuai dengan konteks lokal. Penerapan akuntansi akrualnya lebih konsisten menyeluruh, terutama terkait dengan standarisasi pengakuan, penilaian, dan penyusutan aset sektor publik jangka panjang, seperti yang ditetapkan dalam MPSAS 17. Adapun tantangan implementasi pada negara

indonesia dan malaysia yaitu pada indonesia: tantangan utama berpusat pada optimalisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Hambatannya mencakup keterbatasan kompetensi dan sertifikasi keahlian SDM, infrastruktur teknologi (*hardware* dan internet) yang usang, SOP yang kompleks, serta lemahnya koordinasi antarunit kerja yang membuat laporan keuangan cenderung dianggap sebagai pemenuhan administratif belaka. Adapun tantangan implementasi pada negara indonesia dan malaysia yaitu pada indonesia: tantangan utama berpusat pada optimalisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Hambatannya mencakup keterbatasan kompetensi dan sertifikasi keahlian SDM, infrastruktur teknologi (*hardware* dan internet) yang usang, SOP yang kompleks, serta lemahnya koordinasi antarunit kerja yang membuat laporan keuangan cenderung dianggap sebagai pemenuhan administratif belaka.

Malaysia: Tantangan terbesar terletak pada proses transisi penuh ke basis akrual di level negara bagian (daerah) melalui sistem ISPEKS. Kendala utama meliputi munculnya fenomena kelelahan reformasi (*reform fatigue*) akibat ketidakpastian tanggal implementasi wajib, kurangnya staf ahli di level daerah, kebijakan rotasi kerja pegawai yang terlalu cepat (3–5 tahun), serta kendala teknis dalam pengkodean pos akuntansi. Saran: Indonesia dapat mengadopsi dari Malaysia: Strategi pembentukan lembaga pelatihan akuntansi sektor publik yang terstruktur dan masif (seperti *Institut Perakaunan Negara*) untuk menjaga kontinuitas kompetensi pegawai, serta konsistensi harmonisasi standar lokal dengan kiblata standar global (IPSAS) agar pelaporan lebih terukur. Malaysia dapat mengadopsi dari Indonesia: Keberanian strategi sentralisasi sistem keuangan lewat satu aplikasi tunggal nasional nasional (SAKTI), mengingat sistem di level negara bagian Malaysia saat ini masih terfragmentasi (Sabah dan Sarawak berjalan mandiri di luar ISPEKS). Malaysia juga dapat meniru

ketegasan lini masa regulasi serentak agar terhindar dari penundaan pelaporan yang memicu kejenuhan staf di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hasan, H. A., Saleh, Z., & Isa, C. R. (2022). Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) Implementation in State Governments of Malaysia : Status and Challenges. 12(1), 33–55.
- Huzaimi, Y., Mat, B., Ikram, M., Ramzi, B., Firdaus, M., Wan, B., & Bin, M. S. (2024). Challenges in the Implementation of MPSAS 17 in Malaysian Accrual Accounting Environment. 14(6), 1497–1507. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i6/21798>
- Icih, Leonita Agustin, P., Kurniawan, A., Holle, M. H., & Zumaroh. (2024). International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) and, Good Government Governance in Indonesia and Malaysia. *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 6(1), 94–100.
- Peng, L. S., & Isa, M. (2020). Environmental, social and governance (Esg) practices and performance in shariah firms: Agency or stakeholder theory? *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 16(1), 1–34. <https://doi.org/10.21315/aamjaf2020.16.1.1>
- Peraturan Pemerintah RI No 24. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM, September, 1–2.

- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 濟無No Title No Title No Title. 2, 306–312.
- Silva, M. B. (2016). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Trabalho de Conclusão de Curso*, 1(9), 1–10. <http://www.dikti.go.id/files/atur/PP17-2010Lengkap.pdf>
- Soemartono, T., & Rachmatsyah, T. H. (2025). Implementasi Aplikasi SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan APBN di Direktorat Jenderal. 11(2), 91–105.
- Tarigan, R., Kristin, O., Gaol, L., Bella, K., Hamdani, S. M., Kemala, P., & Lubis, D. (2026). Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua! Pada Laporan Keuangan Di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sebagai Strategi Peningkatan Good Governance Sektor Publik. 5(1), 7607–7615.